



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060 / 74 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Kendal, maka Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tanggal 22 Nopember 2021 Perihal Mohon Asman Konsep Rancangan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 050.6/174/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk :
1. perencanaan jangka menengah;
 2. perencanaan tahunan;
 3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 4. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 5. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 050.6/174/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
3. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

TUGAS : Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

FUNGSI : 1. Penangung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksana pembangunan dan pembina kemasyarakatan di Kabupaten Kendal

2. Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

3. Pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

No	IKU PERANGKAT DAERAH	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pendidikan											
1	APS Dikdas	Pendidikan pada sekolah dasar	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan											
1	AKI	jumlah kasus/jumlah kelahiran	/ 100.000	115,8	110	82	81	80,9	80,8	80,7	80,7	80,7
2	AKB		AKB / 1000	10,04	10	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,5	7,5
3	Prevalensi Stunting		%	17,53	15	14,6	14,2	13,8	13,4	13,4	13,4	13,4
4	Capaian SPM	rata-rata pencapaian 12 SPM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Rasio luas kawasan rawan banjir	Luas kawasan rawan banjir yang	%	-	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	14,23	14,23
2	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73	75,45	75,45	75,45
3	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	98,78
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten 100	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39	81,39
5	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	90,00
6	Rasio bangunan gedung ber-IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber-IMB (PBG) dibagi jumlah bangunan dikali 100	%	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7	Nilai/ Score SIPJAKI	Nilai layanan informasi jasa	Score	65	65	70	75	80	85	90	90	90
8	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaaringan perpipaan dibagi jumlah raumah tangga X 100	%	70,41	72,71	75,01	77,31	79,61	81,91	84,21	84,21	84,21

1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan -----X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pangan									
1	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah)	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90
	Pertanahan									
1	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah milik pemda yang bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah milik pemda x 100%	42,01	47,21	56,13	65,06	73,98	82,9	100	100
	Lingkungan Hidup									
1	Indeks kualitas air		46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
2	Indeks kualitas udara		75,16	72,7	72,79	72,88	72,96	723,06	73,15	73,15
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93
3	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani		75,00	80,00	85,00	95,00	100,00	100	100	100
	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil									
1	Persentase penduduk yang me		99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,91
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta melaksanakan pembangunan desa	4,51	4,88	5,63	6,76	7,89	9,02	10,15	10,15
	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

1	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara	Untuk menghitung persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara adalah dengan menghitung jumlah arsip di 4 Depo yaitu : 1. arsip teratur / sudah diolah = 136.257 berkas = 2,725 m1 2. arsip acak/belum diolah =355,8 m1 3. seluruh arsip dipelihara di di fumigasi serta dilakukan pengamanan dan perawatan dari bencana (banjir/ kebakaran/ pencurian/ kerusakan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Urusan Perikanan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	26.310.557	27.329.687	28.186.222	29.073.233	29.991.244	30.941.807	31.925.497	31.925.497	31.925.497
1	Urusan Pariwisata persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata tahun N - Jumlah kunjungan Tahun N-1 / Jml Kunjungan wisata Tahun N-1 x 100%	-63,24	5,84	5,6	5,98	5,95	6,06	6,06	6,06	6,06
2	Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan/ jumlah pelaku ekraf yang ada x 100%	6	6	12	18	24	30	36	36	36
1	Pertanian Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi)	$\frac{((\text{produktivitas tahun } n - \text{produktivitas tahun } n-1):(\text{produktivitas tahun } n-1)) \times 100\%}{100\%}$	-7,77	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (jagung)	$\frac{((\text{produktivitas tahun } n - \text{produktivitas tahun } n-1):(\text{produktivitas tahun } n-1)) \times 100\%}{100\%}$	10,46	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71
3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (cabai)	$\frac{((\text{produktivitas tahun } n - \text{produktivitas tahun } n-1):(\text{produktivitas tahun } n-1)) \times 100\%}{100\%}$	1,83	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (bawang merah)	$\frac{((\text{produktivitas tahun } n - \text{produktivitas tahun } n-1):(\text{produktivitas tahun } n-1)) \times 100\%}{100\%}$	0,09	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26
5	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi)	$\frac{((\text{produktivitas tahun } n - \text{produktivitas tahun } n-1):(\text{produktivitas tahun } n-1)) \times 100\%}{100\%}$	7,00	1,36	1,36	1,48	1,46	1,44	1,42	1,42	1,40
6	Produksi daging sapi		908	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074	1.074	1.074

1	Persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di bagi jumlah penelitian dan pengembangan yang tersedia dalam SJJELI	%	NA	NA	5	10	15	20	25	25
	KECAMATAN KENDAL										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PATEBON										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PEGANDON										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	64,09	64,09	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	82,9	84,82	84,82	88	88	90	90	90
	KECAMATAN WELERI										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN GEMUH										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	71	73	75	80
70 2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	85,15	87,6	88	89	90	90,5	91	90
	KECAMATAN CEPIRING										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	83	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	
	KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	
	KECAMATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	63	65	70	73	75	77	80	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	76	80	83	85	87	89	90	
	KECAMATAN BOJA										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	68	70	72	75	77	79	81	81
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	89	89	89	90	90	90	91	91

1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61,73	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	88,83	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN										
1	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	PEMERINTAHAN UMUM										
1	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial		%	100	100	100	100	100	100	100	100

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

TUGAS : Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Penangung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal
2. Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
3. Pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat

[illegible]

	Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.											
13	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	61,39	64,41	66,35	67,75	68,32	69,2	69,5	69,5	
14	Nilai SAKIP		nilai	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55	78,55	
15	Indeks SPBE		indeks	3,76	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91	3,91	

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1.	APS Dikdas	Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar / jumlah penduduk berusia 7-15 tahun x 100%	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
1.	AKI	Jumlah kasus kematian ibu hamil/jumlah kelahiran x 100.000 penduduk	AKI / 100.000 Penduduk	115,8	110	82	81	80,9	80,8	80,7	80,7
2.	AKB	Jumlah bayi meninggal/jumlah kelahiran hidup x 1.000 kelahiran hidup	AKB / 1000 Kelahiran Hidup	10,04	10	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,5
3.	Prevalensi Stunting	Jumlah kasus stunting pada balita/jumlah total balita x 100%	%	17,53	15	14,6	14,2	13,8	13,4	13,4	13,4
4.	Capaian SPM	Rata-rata pencapaian 12 SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Persentase luas daerah irigasi kondisi baik	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100%	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45
2.	Persentase jalan kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten x 100%	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik / total panjang jaringan drainase perkotaan x 100%	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM JP dan BJP terlindungi di dalam kabupaten / Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten x 100%	%	93,35	95,35	96,60	97,64	98,84	100,00	100,00	100,00
5	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan SPALD / jumlah rumah tangga x 100%	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	92,77
6	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100%	%	80	80	82	84	86	88	90	90
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x100%	%	84,8	85,15	85,2	85,22	85,24	85,26	85,28	85,28
2.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan berdasarkan luasan yang telah ditetapkan	%	74,82 (SK Lama)	0,74 (SK Baru)	1,48	2,23	2,97	3,71	4,45	4,45
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah	desa/kel	5	7	11	16	21	26	31	31
3.	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	Jumlah kebakaran yang ditangani sesuai standar dibagi jumlah kasus kebakaran x 100%	Persen	97,44	97,44	97,44	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan x 100%	%	65,92	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72	72,72
2	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan x 100%	%	26,53	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74	53,74
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
1.	Presentase penyerapan tenaga kerja	Jumlah pencari tenaga kerja yang terserap dibagi jumlah calon tenaga kerja x 100%	%	19	20	25	30	35	40	45	45
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi / jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100.000	/100.000 penduduk perempuan	20	20	20	20	20	20	20	20
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
1	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1.	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah milik pemda yang bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah milik pemda x 100%	%	42,01	47,21	56,13	65,06	73,98	82,9	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
1.	Indeks kualitas air	Jumlah titik pantau air sesuai dengan baku mutu dibagi jumlah titik pantau air x 100	Indeks	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
2.	Indeks kualitas udara	Jumlah titik pantau udara sesuai baku mutu dibagi jumlah titik pantau udara x 100	Indeks	75,16	72,7	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15	73,15
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Jumlah KEHATI (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik dibagi jumlah KEHATI yang ada x 100	Indeks	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93
4.	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	Jumlah sampah yang dikelola dibagi jumlah sampah yang ditimbulkan x 100%	%	75,00	80,00	85,00	95,00	100,00	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1.	Persentase penduduk yang memiliki administrasi lengkap	Jumlah penduduk yang memiliki administrasi lengkap (KTP, KK, Akte Kelahiran) dibagi jumlah penduduk x 100%	%	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,91
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan mengelolanya dan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. <i>(Jumlah Desa Mandiri tahun ini - Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) / Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) x 100 %</i>	%	4,51	4,88	5,63	6,76	7,89	9,02	10,15	10,15
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana										
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur	Indeks		2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	65	69	69	70	70	71	71	71
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	%	15,77	15	14	13	12	11	10	10

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
1.	Persentase jaringan jalan yang memiliki trayek	Jumlah jaringan jalan yang memiliki trayek dibagi jumlah jaringan jalan x 100%	%	73	73	74	74	75	75	76	76
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi										
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks domain kebijakan internal SPBE merupakan tingkat kematangan aspek 1 (Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,41	2,6	3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2.	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 2 (Perencanaan Strategis SPBE), aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan aspek 4 (Penyelenggara SPBE) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,43	2,6	2,9	3	3,5	3,8	3,8	3,8
3.	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks domain manajemen SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE), dan aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	NA	1	2	2	3	3	3	3
4.	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks domain layanan SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 7 (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan aspek 8 (Layanan Publik Berbasis Elektronik)	Skor	4,03	3,52	3,7	4,2	4,26	4,44	4,44	4,44

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		PermenPANRB 59 th 2020									
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan rata-rata dari tingkat penilaian tahap 1 (informasi wajib berkala/ website), tahap 2 (SAQ/ Kuesioner Penilaian Mandiri yang terdiri dari : 1. Mengumumkan Informasi Publik, 2. Menyediakan Informasi Publik, 3. Pelayanan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik), tahap 3 (verifikasi atas SAQ), tahap 4 (Uji publik penetapan peringkat) Per Komisi Informasi 5 th 2016	Skor	88,8	88,8	89	89,5	90	90,5	91	91
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset / jumlah seluruh koperasi x 100%	%	78	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80	80
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	4,8	5,1	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,4
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
1.	Jumlah Investor baru	Jumlah investor baru yang masuk Kabupaten Kendal	investor	903	432	650	715	786	864	950	4.397,00
2.	Nilai IKM	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	skor	83,33	83	83,6	84	84	85	85	85

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100%	%	0,44	0,88	0,92	0,97	1,01	1,06	1,1	1,1
2.	Jumlah atlet olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Jumlah atlet olah raga yang berprestasi	atlet	35	100	120	130	140	150	160	160
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
1.	Prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	Jumlah perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia / jumlah perangkat daerah x 100%	Prosen	NA	10	15	25	40	50	70	70
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
2.	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan rata-rata dari tingkat kelengkapan dan kematangan area 1 (tata kelola KAMI), area 2 (pengelolaan resiko KAMI), area 3 (kerangka kerja KAMI), area 4 (pengelolaan aset informasi), area 5 (teknologi dan KAMI), dan area 6 (suplemen) Permendagri 18 th 2020	Skore	N/A	130	150	175	200	225	250	250

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan										
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase benda dan tak benda cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan										
1.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat digunakan untuk mengukur nilai tingkat kegearan membaca masyarakat pada usia membaca (umur 15 - 69 tahun) dengan menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel/indikator utama seperti : 1. I dikator Frekuensi membaca per minggu, 2. Indikator durasi membaca/ lama membaca per hari, 3. Indikator jumlah bahan bacaan yang ditamatkan per tahun. Rumus Nilai tingkat membaca = ((Total score / Jumlah Responden)/5)x100%	%	40,37	40,37	40,50	40,80	41,00	41,30	41,50	41,50
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan										
1.	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara	Untuk menghitung persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara adalah dengan menghitung jumlah arsip di 4 Depo yaitu : 1. arsip teratur / sudah diolah = 136.257 berkas = 2,725 m1 2. arsip acak/belum diolah =355,8 m1 3. seluruh arsip dipelihara di di fumigasi serta dilakukan pengamanan dan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dari bencana (banjir/ kebakaran/ pencurian/ kerusakan)									
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	kg	26.310.557	27.329.687	28.186.222	29.073.233	29.991.244	30.941.807	31.925.497	31.925.497
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
1	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata tahun N - Jumlah kunjungan Tahun N-1 / Jml Kunjungan wisata Tahun N-1 x 100%	%	-63,24	5,84	5,6	5,98	5,95	6,06	6,06	6,06
2	Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan/ jumlah pelaku ekraf yang ada x 100%	%	6	6	12	18	24	30	36	36
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen	Ku/ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25	57,25
		Produksi pertanian (jagung) dibagi luas panen	Ku/ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19	71,19
		Produksi pertanian (bawang merah) dibagi luas panen	Ku/ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85	94,85
		Produksi pertanian (cabe) dibagi luas panen	Ku/ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,50
		Produksi pertanian (kopi) dibagi luas panen	Ku/ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99	7,99
2	Produksi daging sapi	Jumlah daging sapi	ton	908	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074	1.074
3	Produksi daging ayam ras	Jumlah daging ayam ras	ton	14.931	15.180	15.300	15.450	15.600	15.850	16.000	16.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
1	Persentase pasar yang layak fungsi	Jumlah pasar yang layak fungsi dibagi jumlah pasar yang ada x 100%	%	0	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46	46,15	46,15

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting	Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting / total barang pokok dan barang penting x 100%	%	148	150	150	150	150	150	150	150
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	%	0	0	20	40	50	60	70	70
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian											
1	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja	Nilai Dimensi Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN	Skor	42,66	42,66	42,67	42,7	42,72	42,72	42,72	42,72
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan											
1	Dimensi Kompetensi	Nilai Kompetensi IP ASN	Skor	32,62	33	33,62	34	34	35	36	36
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan											
1	Nilai PMPRB			B	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai rata-rata SAKIP OPD yang dievaluasi	Jumlah nilai total SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi/total Perangkat Daerah yang dievaluasi	Nilai	66,31	68,55	70,25	72,25	73,55	75,55	77,55	77,55
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan											
1	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Seperangkat dimensi terdiri dari enam dimensi yakni (1) Kesesuaian dokumen	rentang IPKD	0	79,325	79,326	79,327	79,328	79,329	79,330	79,330

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).									
2	KFD (Kapasitas Fiskal daerah)	Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu	rentang IKFD	0,733	0,800	0,8500	0,900	0,900	0,950	1,000	1,000
3	Besaran PAD terhadap keseluruhan pendapatan dalam APBD	Realisasi PAD dibagi realisasi keseluruhan pendapatan dikalikan 100%	%	21	16	19,66	19,93	20,13	20,52	21,10	21,10
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan											
1.	Nilai Perencanaan Dalam Sakip	Jumlah skor nilai perencanaan dalam sakip kabupaten	Skor	22,52	22,77	23,01	23,26	23,50	23,75	24,00	24,00
2.	Persentase realisasi sasaran pembangunan	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang tercapai / jumlah indikator x 100%	%	62,5	60,6	75,76	81,80	90,91	93,94	96,97	96,97
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan											
1.	Indek Inovasi Daerah	Jumlah skor inovasi di daerah	kategori	Sangat Inovatif (4239)	Inovatif (30)	Inovatif (32)	Inovatif (34)	Inovatif (36)	Inovatif (38)	Inovatif (40)	Inovatif (40)
2	Persentase penelitian dan pengembangan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang	%	NA	NA	5	10	15	20	25	25

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	yang diimplementasikan	dilaksanakan / jumlah penelitian dan pengembangan yang tersedia dalam SIJELI x 100%									
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat daerah											
1.	Nilai Komponen pelaporan SAKIP	Nilai LHE (Komponen pelaporan)	Nilai	9	9,17	9,33	9,50	9,67	9,83	10	10
2.	Nilai penataan dan Penguatan Organisasi	Jumlah nilai penataan organisasi berbasis kinerja ditambah nilai penyederhanaan organisasi ditambah nilai hasil evaluasi kelembagaan	Nilai	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,5
3	Indek Tata Kelola PBJ	Indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ untuk menghasilkan skor dan predikat penilaian di antaranya 100=sangat baik, > 80 s.d 99 = baik, > 60 s.d 80 = cukup, dan ≤ 60 = kurang	indek		30	40	50	60	70	80	80
4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Komponen kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dalam reformasi birokrasi	Nilai	70,66	72,21	73,76	75,31	76,86	78,41	79,96	79,96
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD											
1.	Indeks IKM (DPRD)	Jumlah anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD/Jumlah anggota DPRD x 100%	indeks	60	65	70	75	80	80	80	80
KECAMATAN KENDAL											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	75,57	70	71	72	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari	Skor	83	83,12	85	87	88	89	90	90

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		layanan pemerintah)									
KECAMATAN PATEBON											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	69,15	69,75	70	74	75	80	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	80	90,28	91	92	93	94	95	95
KECAMATAN PEGANDON											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	64,05	69,76	70	73	75	77	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82,9	84,82	85	85,25	85,50	86	87	87
KECAMATAN WELERI											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	72,37	73	74	75	76	78	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	85,39	80,47	82	84	86	88	90	90
KECAMATAN GEMUH											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	71,64	72	72,5	73	73,5	74	75	75
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	87,905	88	88,5	89	89,5	91	91	91
KECAMATAN CEPIRING											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	83	84	85	87	88	89	90	90
KECAMATAN KALIWUNGU											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	62,79	70,03	71	73	75	77	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	91,18	95,55	96	96	96	96	96	96
KECAMATAN BRANGSONG											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70	71	72	74	75	77	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat	Skor	79	80	83	85	87	89	90	90

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat (IKM)	(kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)									
KECAMATAN BOJA											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	69	71	73	75	77	79	81	81
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	90	92	92	93	93	93	94	94
KECAMATAN LIMBANGAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	62,17	64	64,5	65	65	65	65	65
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	92,83	93	94	95	96	97	97	97
KECAMATAN SINGOROJO											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	71,18	71,2	71,3	71,4	71,5	71,8	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	91,19	91,2	91,5	91,7	91,9	92,1	92,2	92,2
KECAMATAN SUKOREJO											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70,51	75,39	79,15	80,05	80,72	80,91	81,35	81,35
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82,49	82,03	83,57	83,94	84,17	84,47	85,71	85,71
KECAMATAN PATEAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	63	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82	84	85	87	88	89	90	90
KECAMATAN PAGERUYUNG											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70,22	71	71,5	72	73	74	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	82	83	84	85	85,5	86	86,5	86,5
KECAMATAN PLANTUNGAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	60,86	61	62,5	63,5	65	66,5	68	68
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat	Skor	84,53	84,6	84,61	84,62	84,63	84,64	84,65	84,65

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat (IKM)	(kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)									
KECAMATAN ROWOSARI											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	70,22	71	71,5	72	73	74	76	76
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	84	86	87	88	89	90	91	91
KECAMATAN KANGKUNG											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	78,76	79	79,5	80	80,5	81	82	82
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	87,55	88	88,5	89	89,5	90	91	91
KECAMATAN RINGINARUM											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	80	83	84	85	86	87	87	87
KECAMATAN NGAMPEL											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61,73	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	88,83	84	85	87	88	89	90	90
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN											
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	68,13	68,63	69,13	69,63	70,13	70,63	71,13	71,13
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat (kualitatif dan kuantitatif dari layanan pemerintah)	Skor	87,67	86,25	86,85	87,45	88,05	88,65	89,25	89,25
Urusan Pemerintahan Umum											
1.	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Jumlah kejadian konflik sosial yang ditangani / jumlah kejadian konflik sosial x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan -----X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	/100.000 penduduk perempuan	4,96	20	20	20	20	20	20	20	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan												
1	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90	Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup												
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka yang menunjukkan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL	nilai	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82	Lingkungan Hidup
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pendaur ulang sampah.	%	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	35	40	45	50	55	60	60	